

### Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar

Ni Komang Putriani<sup>1\*</sup>

Komangputriani54@gmail.com<sup>1\*</sup>

Universitas Ngurah Rai<sup>1</sup>

#### Info Artikel

##### Sejarah Artikel:

Disubmit

Direvisi

Diterima

##### Keywords:

partisipasi perempuan,  
perencanaan pembangunan  
desa, pemberdayaan  
perempuan, sekolah  
perempuan.

(:)

#### Abstrak

Pembangunan desa yang partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Namun dalam praktiknya, partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai hambatan sosial dan budaya yang membatasi keterlibatan mereka dalam ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa serta mengkaji peran Sekolah Perempuan dalam mendorong keterlibatan perempuan di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan anggota Sekolah Perempuan, pengurus komunitas, perangkat desa, serta tokoh masyarakat, dan didukung oleh dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Sekolah Perempuan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran kritis, dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam forum perencanaan pembangunan desa seperti musyawarah desa dan musrenbangdes. Perempuan mulai aktif menyampaikan aspirasi terkait isu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, partisipasi perempuan masih menghadapi hambatan berupa norma patriarki, beban kerja domestik, serta dominasi laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan komunitas melalui Sekolah Perempuan menjadi strategi penting dalam memperkuat partisipasi perempuan serta mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan responsif gender.

#### Abstract

Participatory village development places communities as key actors in the planning and decision-making processes of local development. However, in practice, women's participation in village development planning often faces social and cultural barriers that limit their involvement in public decision-making spaces. This study aims to analyze women's participation in village development planning and examine the role of the Women's School (Sekolah Perempuan) in encouraging women's involvement in Dauh Puri Kaja Village, Denpasar City. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews with members of the Women's School, community leaders, village officials, and community figures, as well as documentation of program activities. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by triangulation techniques to ensure data validity. The findings indicate that the Women's School plays an important role in increasing women's knowledge, critical awareness, and confidence to participate in village development planning forums such as village deliberation meetings and development planning forums. Women have begun to actively express their aspirations regarding health services, education, social protection, and household economic strengthening. Nevertheless, women's participation still faces several challenges, including patriarchal norms, domestic workload, and male-dominated decision-making structures at the village level. This study highlights community-based education through the Women's School as an important strategy to strengthen women's participation and promote more inclusive and gender-responsive village development.

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi prinsip utama yang menentukan keberhasilan proses pembangunan di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kehadiran dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kebijakan. Pendekatan pembangunan yang partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta pandangan mereka terhadap arah pembangunan yang dijalankan di wilayahnya.

Menurut Sherry R. Arnstein (1969), partisipasi warga dapat dipahami melalui konsep *ladder of citizen participation* yang menggambarkan tingkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka tersebut, partisipasi masyarakat bergerak dari bentuk yang bersifat simbolis hingga keterlibatan yang memberikan kekuatan nyata kepada warga dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya proses pembangunan yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, keterlibatan masyarakat secara aktif telah diatur dalam berbagai kebijakan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa umumnya dilaksanakan melalui forum musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan secara merata, terutama bagi kelompok perempuan yang sering kali masih menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, maupun budaya.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Namun demikian, dalam banyak kasus perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Menurut Naila Kabeer (1999), pemberdayaan perempuan berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk membuat pilihan strategis dalam kehidupan mereka, khususnya dalam konteks yang sebelumnya membatasi pilihan tersebut. Ketika perempuan memiliki akses terhadap informasi, pendidikan, serta ruang partisipasi yang lebih luas, maka peluang mereka untuk terlibat dalam proses pembangunan juga semakin terbuka.

Dalam upaya mendorong partisipasi perempuan di tingkat komunitas, berbagai inisiatif pemberdayaan telah dikembangkan, salah satunya melalui pembentukan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan merupakan ruang belajar berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran kritis perempuan mengenai hak-hak mereka, kesetaraan gender, serta keterlibatan dalam proses pembangunan. Melalui proses belajar bersama, perempuan didorong untuk memahami isu-isu sosial di lingkungan mereka, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta memperkuat keberanian untuk menyampaikan aspirasi dalam forum-forum publik. Menurut Paulo Freire (1970), pendidikan kritis dapat menjadi sarana transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat, termasuk perempuan, untuk memahami realitas sosial dan berperan aktif dalam perubahan.

Di Kota Denpasar, khususnya di Desa Dauh Puri Kaja, keberadaan Sekolah Perempuan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat kapasitas perempuan di tingkat akar rumput. Melalui kegiatan belajar, diskusi, serta penguatan organisasi perempuan, Sekolah Perempuan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka sebagai warga desa serta mendorong keterlibatan mereka dalam proses perencanaan

pembangunan desa. Kehadiran ruang belajar ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah bagi perempuan untuk membangun solidaritas, kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam ruang-ruang publik.

Meskipun berbagai program pemberdayaan perempuan telah dilakukan, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana inisiatif seperti Sekolah Perempuan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa serta bagaimana peran Sekolah Perempuan dalam mendorong keterlibatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika partisipasi perempuan di tingkat lokal serta kontribusi program pemberdayaan dalam memperkuat perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif dan responsif gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa serta mengkaji peran Sekolah Perempuan dalam mendorong keterlibatan perempuan di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pemberdayaan perempuan serta memperkuat praktik pembangunan desa yang lebih partisipatif dan inklusif.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan dan demokratisasi proses pembangunan. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, implementasi program, pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi kegiatan pembangunan.

Sherry R. Arnstein (1969) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi yang bersifat simbolis hingga partisipasi yang memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam model ini, partisipasi masyarakat dibagi menjadi delapan tingkatan yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang partisipatif memerlukan strategi yang mampu mendorong keterlibatan berbagai kelompok masyarakat secara inklusif, termasuk kelompok perempuan yang sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses ruang partisipasi publik.

### **Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Komunitas**

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga dengan proses sosial yang memungkinkan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, informasi, serta ruang pengambilan keputusan.

Paulo Freire (1970) dalam konsep pendidikan kritis menjelaskan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat memahami realitas sosial yang mereka hadapi serta mengambil peran dalam proses perubahan sosial. Melalui proses pendidikan yang bersifat dialogis dan

partisipatif, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran kritis mengenai berbagai bentuk ketidakadilan sosial serta memperkuat kapasitas mereka untuk memperjuangkan perubahan.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas, pendidikan berbasis komunitas menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan. Salah satu bentuk pendidikan komunitas yang berkembang di Indonesia adalah Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan merupakan ruang belajar kolektif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Cornwall dan Rivas (2023) menunjukkan bahwa ruang belajar komunitas yang berbasis pada pengalaman perempuan dapat memperkuat kesadaran kritis serta meningkatkan keberanian perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Melalui proses belajar bersama, perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Sekolah Perempuan dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Melalui peningkatan kapasitas, penguatan kesadaran kritis, serta pembentukan jaringan sosial antarperempuan, program ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk berperan lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus tertentu secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami proses, interaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Robert K. Yin (2018) yang menyatakan bahwa studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar, yang menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program Sekolah Perempuan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan komunitas perempuan yang secara aktif mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan dan mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta forum pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas perempuan dalam kegiatan Sekolah Perempuan serta keterlibatan mereka dalam forum perencanaan pembangunan desa seperti musyawarah desa atau kegiatan komunitas. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial serta interaksi yang terjadi dalam proses partisipasi perempuan.
2. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik penelitian. Informan penelitian meliputi anggota Sekolah Perempuan, pengurus Sekolah Perempuan, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen, laporan kegiatan, notulen pertemuan, foto kegiatan, serta berbagai catatan yang berkaitan dengan kegiatan Sekolah Perempuan dan proses perencanaan pembangunan desa. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang[] diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami pola-pola yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik ini diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang lebih kuat.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa serta peran Sekolah Perempuan dalam memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar.

#### **4. PEMBAHASAN**

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Dalam konteks Desa Dauh Puri Kaja, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan desa menunjukkan dinamika yang berkembang seiring dengan adanya berbagai upaya pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas. Salah satu upaya yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan tersebut adalah keberadaan Sekolah Perempuan sebagai ruang belajar dan penguatan kapasitas perempuan di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Dauh Puri Kaja menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam forum-forum pembangunan desa seperti musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Perempuan yang tergabung dalam Sekolah Perempuan mulai berani menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terkait berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti akses layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui pendidikan komunitas dapat meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka sebagai warga desa yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian UN Women (2022) yang menyatakan bahwa program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Program yang memberikan akses terhadap pendidikan, informasi, serta ruang diskusi kolektif mampu memperkuat kapasitas perempuan untuk menyuarakan kepentingan mereka dalam ruang-ruang publik. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi juga mendorong perubahan dalam dinamika partisipasi sosial di tingkat komunitas.

Secara teoritis, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dianalisis melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969). Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi yang bersifat simbolis hingga partisipasi yang memberikan kekuatan nyata kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi perempuan di Desa Dauh Puri Kaja menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar kehadiran dalam forum musyawarah menuju keterlibatan yang lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan komunitas. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan

strategis masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar perempuan dapat memiliki posisi yang lebih setara dalam struktur pengambilan keputusan di tingkat desa.

Peningkatan partisipasi perempuan tersebut juga tidak terlepas dari peran Sekolah Perempuan sebagai ruang pembelajaran sosial yang memperkuat kapasitas perempuan. Melalui berbagai kegiatan diskusi, pelatihan kepemimpinan, serta pembelajaran mengenai kesetaraan gender, perempuan memperoleh pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai bagian dari masyarakat desa. Proses pembelajaran ini sejalan dengan konsep pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (1999) yang menekankan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan individu untuk memperoleh sumber daya (resources), memiliki kemampuan untuk bertindak (agency), serta mencapai perubahan sosial (achievements).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pendidikan komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan lokal. Studi yang dilakukan oleh Cornwall dan Rivas (2023) menunjukkan bahwa ruang belajar komunitas yang berbasis pada pengalaman hidup perempuan mampu mendorong munculnya kesadaran kritis mengenai ketimpangan gender serta memperkuat keberanian perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Hal ini juga terlihat dalam konteks Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja, di mana perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun solidaritas kolektif yang memperkuat posisi mereka dalam masyarakat.

Selain meningkatkan kapasitas individu, Sekolah Perempuan juga berfungsi sebagai ruang kolektif yang memperkuat solidaritas antarperempuan. Dalam berbagai kegiatan diskusi dan pertemuan komunitas, perempuan dapat berbagi pengalaman mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi ini tidak hanya memperkuat jaringan sosial antarperempuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan keberanian untuk menyuarakan aspirasi dalam forum publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian World Bank (2024) yang menunjukkan bahwa penguatan jaringan sosial perempuan di tingkat komunitas dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam mempengaruhi proses pembangunan lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah norma sosial yang masih menempatkan perempuan lebih dominan dalam ranah domestik. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering kali memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat dalam kegiatan publik. Selain itu, struktur pengambilan keputusan di tingkat desa yang masih didominasi oleh laki-laki juga menjadi tantangan bagi perempuan untuk memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan laporan UNDP (2023) yang menyatakan bahwa meskipun berbagai kebijakan telah mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan lokal, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural seperti budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap informasi, serta ketimpangan relasi kekuasaan dalam struktur pemerintahan lokal. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi perempuan tidak hanya memerlukan program pemberdayaan perempuan, tetapi juga perubahan dalam struktur sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

Dalam konteks pembangunan desa, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perempuan sering kali memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat berbagai persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, kesehatan masyarakat, serta pendidikan anak. Dengan melibatkan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa, kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal yang membuka ruang partisipasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas perempuan. Sekolah Perempuan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat partisipasi perempuan di tingkat akar rumput, sehingga

perempuan dapat berperan lebih aktif dalam proses pembangunan desa dan turut menentukan arah pembangunan yang lebih adil dan inklusi.

### 5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Dauh Puri Kaja mulai mengalami perkembangan yang positif seiring dengan adanya upaya pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan. Perempuan yang tergabung dalam Sekolah Perempuan tidak hanya hadir dalam forum-forum pembangunan desa, tetapi juga mulai berani menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan mereka mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kesadaran perempuan memiliki pengaruh penting dalam mendorong keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa.

Keberadaan Sekolah Perempuan terbukti menjadi ruang belajar komunitas yang efektif dalam meningkatkan kesadaran kritis perempuan mengenai hak-hak mereka sebagai warga desa. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan diskusi, perempuan memperoleh pemahaman mengenai kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, serta mekanisme perencanaan pembangunan desa. Proses ini turut meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah desa dan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan komunitas.

Namun demikian, partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa masih menghadapi beberapa hambatan. Norma sosial yang masih menempatkan perempuan dalam peran domestik, keterbatasan waktu akibat beban kerja rumah tangga, serta struktur pengambilan keputusan yang masih didominasi oleh laki-laki menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas perempuan sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pembangunan desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pendidikan komunitas seperti Sekolah Perempuan dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan, proses perencanaan pembangunan desa diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

### 6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa, misalnya dengan memastikan keterwakilan perempuan dalam forum musyawarah desa dan kegiatan perencanaan pembangunan lainnya.
2. Program pemberdayaan perempuan seperti sekolah perempuan perlu terus diperkuat dan dikembangkan sebagai sarana peningkatan kapasitas perempuan di tingkat komunitas. Program ini dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan advokasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
3. Lembaga masyarakat dan organisasi pendamping diharapkan dapat terus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi masyarakat, pelatihan kepemimpinan perempuan, serta penguatan jaringan komunitas perempuan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari program pemberdayaan perempuan terhadap perubahan sosial di tingkat desa, termasuk pengaruhnya terhadap kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan inklusif. Dengan

demikian, penelitian di bidang ini dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan pembangunan yang berkeadilan gender.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works?. *Journal of International Development*, 28(3), 342–359. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Cornwall, A., & Rivas, A. M. (2023). From gender equality to women's empowerment: Feminist visions of development in the twenty-first century. *Development Policy Review*, 41(2), 215–230.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penyusunan rencana pembangunan desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- UN Women. (2022). *Women's participation in local governance and development*. New York: UN Women.
- United Nations Development Programme. (2023). *Gender equality strategy 2022–2025*. New York: UNDP.
- World Bank. (2024). *Women, business and the law 2024*. Washington, DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.